



**ANALISIS PENETAPAN HARGA POKOK  
PRODUKSI KAYU TEBANGAN PADA PT. BINA  
MAHAWANA WISESA**

PERPUSTAKAAN KEJATI UNH. & HASANUDDIN	
Tgl. diterima	17-10-2001
Klasifikasi	Fak. ekonomi
Jumlah	1 eks
Bl. / No. 1	Hadiah
No. 1	0171001 - 201
No. 2	15821



OLEH:

MARTINUS TULAK LIMBONG  
A31196031

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2001**

**ANALISIS PENETAPAN HARGA POKOK  
PRODUKSI KAYU TEBANGAN PADA PT. BINA  
MAHAWANA WISESA**

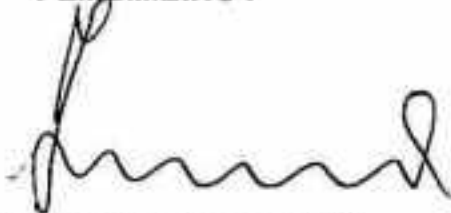
**OLEH:**

**MARTINUS TULAK LIMBONG  
A31196031**

**SKRIPSI SARJANA LENGKAP UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN  
SYARAT GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI PADA FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**DISETUJUI OLEH:**

**PEMBIMBING I**



**(ZAINUDDIN, SE, M.Si, Ak.)**

**PEMBIMBING II**



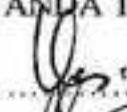

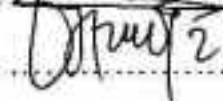
**(AGUS BANDANG, SE, Ak.)**

**ANALISIS PENETAPAN HARGA POKOK PRODUKSI KAYU  
TEBANGAN PADA PT. BINA MAHAWANA WISESA**

**OLEH:  
MARTINUS TULAK LIMBONG  
A311 96 031**

**TELAH DIUJI DAN LULUS TANGGAL 25 AGUSTUS 2001**

**TIM PENGUJI**

NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Drs. Mansyur Sain, DESS, Ak	(Ketua, FE-UH)	1. 
2. Drs. Zainuddin M. Si, Ak.	(Sekretaris, FE-UH)	2. 
3. Drs. M. Ashari, Ak.	(Anggota, FE-UH)	3. 
4. Drs. Darwis Said, Ak.	(Anggota, FE-UH)	4. 

**DISETUJUI OLEH,**

Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Hasanuddin  
Ketua / Sekretaris

Tim Penguji  
Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Unhas  
Ketua

  
Drs. M. Natsir Kadir, M.Si., Ak.

  
Drs. Mansyur Sain, DESS, Ak.

## KATA PENGANTAR

Skripsi merupakan tugas akhir yang disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Tujuan penulisan skripsi adalah menghadapkan mahasiswa secara langsung pada masalah ataupun pekerjaan di lapangan sehingga pengetahuan teoritis yang diterima di bangku kuliah dapat dikembangkan dan digunakan dalam menganalisis dan memecahkan masalah sesuai dengan disiplin ilmu.

Penulisan skripsi ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan pada PT Bina Mahawana Wisesa Kolaka. Judul yang menjadi pokok bahasan pada penulisan ini adalah 'Analisis Penetapan Harga Pokok Produksi Kayu Tebangan Pada PT Bina Mahawana Wisesa'.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Selama menuntut ilmu hingga penulisan skripsi ini selesai, penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun moril; kepada mereka yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan terima kasih khususnya kepada:

1. Bapak Zainuddin SE, M.Si, Ak. dan Bapak Agus Bandang SE, Ak. selaku pembimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
2. Bapak Rektor Unhas, Dekan Fakultas Ekonomi, Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi.
3. Bapak Nasruddin SE, selaku penasehat akademik selama kuliah di Fakultas Ekonomi.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh *civitas academica* Unhas Fakultas Ekonomi.
5. Bapak Pimpinan dan staf PT Bina Mahawana Wisesa.
6. John, Adel, Ike, Vivin, Shinta, Nona, Bruno, Marsel, Evi, Ita, Frans, T'kong, Fidel, Mulyadi dan Roni, serta teman-teman di KAP BM terima kasih atas canda dan callanya.
7. Kedua orang tua dan adik-adik : Moniq, Tien, Enda, Tangke dan Wety.
8. Keluarga Tante Erni, Om Amba dan Om Kadang serta semua sahabat di Mandengen: Yudi, Bobby, Otto, Kia, Lutfi, Sam, Yance, Tony, Atten, Gerson dan...
9. Keluarga Sattu Todingan.

Makassar, Juli 2001

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Lembaran Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Skema .....	viii
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Masalah Pokok .....	4
1.3 Batasan Masalah .....	4
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	4
<b>Bab II Metodologi .....</b>	<b>6</b>
2.1 Metode Pengumpulan Data .....	6
2.2 Jenis dan Sumber Data .....	6
2.3 Metode Analisis .....	7
2.4 Sistematika Pembahasan .....	8
<b>Bab III Landasan Teori .....</b>	<b>10</b>
3.1 Pengertian Biaya .....	10
3.2 Penggolongan Biaya .....	13
3.3 Pengertian dan Tujuan Harga Pokok Produksi .....	21

3.3.1	Pengertian Harga Pokok Produksi .....	21
3.3.2	Tujuan Harga Pokok Produksi .....	23
3.4	Tinjauan Teoritis Tentang Hutan .....	24
3.4.1	Hutan Alam .....	24
3.4.2	Hutan Tanaman Industri .....	29
3.5	Komponen Biaya Yang Membentuk Harga Pokok Perusahaan Pengelola HPH.....	35
3.6	Perlakuan Akuntansi Terhadap HPP Kayu Tebangan Menurut Standar Akuntansi Kehutanan .....	36
3.7	<i>Accretion</i> .....	41
<b>Bab IV</b>	<b>Gambaran Umum Perusahaan</b> .....	<b>43</b>
4.1	Sejarah Singkat Perusahaan .....	43
4.2	Struktur Organisasi .....	43
4.3	Proses Perolehan Kayu Bulat .....	46
4.4	Komponen Biaya yang Membentuk HPP Kayu Tebangan PT Bina Mahawana Wisesa .....	49
<b>Bab V</b>	<b>Pembahasan</b> .....	<b>51</b>
5.1	Identifikasi dan Klasifikasi Biaya Produksi .....	53
5.2	Pemisahan Biaya Produksi Tahun Berjalan dengan Biaya Dikapitalisasi Berdasarkan SAK .....	67
5.3	Perhitungan Amortisasi Beban Ditangguhkan .....	71
5.3	Perbandingan HPP Menurut Perusahaan dan SAK .....	72
<b>Bab VI</b>	<b>Kesimpulan dan Saran</b> .....	<b>76</b>
6.1	Kesimpulan .....	76
6.2	Saran .....	78

#### Daftar Pustaka

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Penggolongan biaya .....	15
Tabel 2 : Biaya perencanaan .....	54
Tabel 3 : Biaya penanaman hutan alam .....	56
Tabel 4 : Biaya penanaman jalur tebang yang telah diproduksi .....	57
Tabel 5 : Biaya penanaman tanah kosong .....	57
Tabel 6 : Biaya penanaman kiri kanan jalan .....	58
Tabel 7 : Biaya penanaman hutan lindung .....	58
Tabel 8 : Biaya pemeliharaan dan pembinaan hutan .....	59
Tabel 9 : Biaya pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan .....	60
Tabel 10 : Biaya pemungutan hasil hutan .....	61
Tabel 11 : Biaya pemenuhan kewajiban terhadap negara .....	63
Tabel 12 : Realisasi biaya pelaksanaan HPH bina desa hutan .....	65
Tabel 13 : Alokasi biaya pembangunan jalan .....	66
Tabel 14 : Perhitungan Amortisasi Beban ditangguhkan .....	72



## DAFTAR SKEMA

	Halaman
Skema 1 : Struktur organisasi PT Bina Mahawana Wisesa .....	41
Skema 2 : Unsur-unsur biaya produksi kayu tebangan PT Bina Mahawana Wisesa .....	50
Skema 3 : Unsur biaya produksi kayu tebangan .....	52
Skema 4 : Perbandingan laporan harga pokok produksi .....	73

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan perekonomian saat ini telah membawa dunia usaha pada suatu situasi yang relatif lebih kompetitif dan kompleks. Fenomena ini menuntut dan mengharuskan suatu perusahaan senantiasa mencermati perubahan perekonomian yang terjadi. Hal itu berarti konsep suatu perusahaan dan strateginya haruslah berorientasi perubahan yang sanggup menangkap perubahan itu sekecil apapun, di samping terus berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perusahaan.

Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal tersebut merupakan acuan bagi penyelenggara pembangunan dan pengelola kehutanan.

Pendayagunaan hasil hutan dilakukan secara terencana, optimal dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan. Pelaksanaan pengelolaan hasil hutan harus ditangani secara profesional agar memberikan hasil yang optimal.

Perusahaan pengelola hutan mempunyai karakteristik khusus. Keberhasilan pembangunan kehutanan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi semata, namun juga dari aspek sosial dan ekologi. Dari segi ekonomi harus mampu memberikan sumbangan bagi pertumbuhan perekonomian nasional dan pengembangan wilayah. Dari segi sosial diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Sedangkan, dari segi ekologi dituntut untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan dan menjamin kelestarian hutan. Dengan demikian, maka pengelolaan hutan yang profesional dicirikan oleh kinerja yang berupa *profitabilitas*, *prosperitas* dan *sustainabilitas*.

Perusahaan pengelola hutan antara lain pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), yang memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan (penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengolahan dan pemasaran). Pengolahan areal HPH/HPHTI meliputi fungsi perencanaan pengusahaan hutan, pengorganisasian perusahaan terutama pendayagunaan tenaga teknis kehutanan, pelaksanaan pengusahaan hutan, perlindungan, pengawasan serta pengamanan hutan.

Pengertian hasil pengusahaan hutan meliputi hasil tebangan, hasil olahan dan hasil hutan lainnya. Setiap proses pengusahaan masing-masing

hasil memiliki karakteristik khusus. Setiap hasil yang dimaksudkan mempunyai harga pokok produksi yang dihitung secara terpisah.

Komponen harga pokok produksi perusahaan pengelola hasil hutan berbeda dengan perusahaan manufaktur. Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan bahwa:

"Harga pokok produksi kayu tebangan dan hasil hutan lainnya meliputi beban yang terjadi dalam hubungannya dengan kegiatan-kegiatan seperti: perencanaan, penanaman, pemeliharaan dan pembinaan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan pengamanan hutan, pemungutan hasil hutan, pemenuhan kewajiban terhadap negara, pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial, dan pembangunan sarana dan prasarana".<sup>1)</sup>

PT. Bina Mahawana Wisesa merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pemungutan hasil hutan. Perusahaan tersebut mempunyai perhitungan harga pokok produksi kayu tebangan yang berbeda dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku sehingga biaya produksi dilaporkan lebih besar. Kelemahan penetapan harga pokok produksi kayu tebangan ini membuat penulis termotivasi untuk mencoba membuat penetapan harga pokok yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dalam suatu penulisan skripsi dengan judul **"ANALISIS PENETAPAN HARGA POKOK PRODUKSI KAYU TEBANGAN PADA PT BINA MAHAWANA WISESA"**.

---

<sup>1)</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 32*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 1999, paragraf 16.

## 1.2 Masalah Pokok

Masalah pokok dalam penulisan ini adalah perusahaan mengalokasikan semua beban pembuatan jalan, beban *loading* dan sewa pangkalan serta suku cadang sebagai biaya produksi; belum membedakan kegiatan penanaman untuk produksi dan bukan produksi. Hal ini disebabkan perusahaan belum sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Kehutanan sehingga mengakibatkan biaya produksi dilaporkan lebih besar.

## 1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi beberapa hal dalam penulisan ini, yaitu: penulisan skripsi ini diarahkan pada penetapan harga pokok produksi kayu tebangan berdasarkan Standar Akuntansi Kehutanan pada perusahaan pengelola Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT Bina Mahawana Wisesa berdasarkan data tahun 1999.

## 1.4 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk membandingkan penetapan harga pokok produksi kayu tebangan berdasarkan Standar Akuntansi Kehutanan dengan pelaksanaan dalam dunia usaha.

2. Untuk menghitung harga pokok kayu tebangan berdasarkan Standar Akuntansi Kehutanan.

Kegunaan yang diharapkan dalam penulisan ini adalah:

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan untuk penetapan harga pokok produksi.
2. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

## BAB II

### METODOLOGI

#### 2.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk kepentingan penulisan skripsi ini terdiri atas:

- 1 Penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu penulis mempelajari literatur-literatur akuntansi dan literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas guna memperoleh kerangka teori, sekaligus sebagai alat dalam menganalisis dan membandingkan data yang diperoleh untuk menjelaskan solusi permasalahan yang dikemukakan sebelumnya.
- 2 Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung pada objek penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan; melakukan wawancara dengan pimpinan dan karyawan perusahaan yang berkompeten dan juga mempelajari dokumen perusahaan yang ada hubungannya dengan proses produksi.

#### 2.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini , yaitu;

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan langsung, wawancara dengan pimpinan dan karyawan perusahaan yang berwenang dan terkait dengan masalah yang dibahas.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa bahan dokumentasi dan sumber informasi tertulis lainnya.

### 2.3 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif, yaitu menguraikan dan membandingkan penetapan harga pokok produksi kayu tebangan menurut PT Bina Mahawana Wisesa dengan penetapan harga pokok produksi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Kehutanan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data:

1. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi biaya yang masuk sebagai harga pokok produksi.
2. Memisahkan biaya-biaya yang langsung diperlakukan sebagai harga pokok produksi tahun berjalan dengan biaya-biaya yang dikapitalisasi sebagai beban ditangguhkan.
3. Menghitung amortisasi beban ditangguhkan yang akan dialokasi sebagai harga pokok produksi tahun berjalan dengan menggunakan metode garis lurus
4. Membandingkan perhitungan harga pokok produksi menurut Perusahaan dan Standar Akuntansi Kehutanan.



## 2.4 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, pokok masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan.

Bab kedua, menguraikan tentang metodologi penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis dan sistematika pembahasan.

Bab ketiga, landasan teori yang berisikan pengertian biaya, klasifikasi biaya, pengertian dan tujuan harga pokok produksi, tinjauan teoritis tentang hutan, komponen biaya yang membentuk harga pokok produk perusahaan pengelola HPH, dan perlakuan akuntansi terhadap harga pokok produksi kayu tebangan menurut Standar Akuntansi Kehutanan serta *accretion*.

Bab keempat, merupakan gambaran umum perusahaan, terdiri atas: sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, proses perolehan kayu tebangan serta komponen harga pokok produksi PT Bina Mahawana Wisesa.

Bab kelima, berisikan identifikasi dan klasifikasi biaya produksi, pemisahan biaya produksi tahun berjalan dengan biaya yang dikapitalisasi berdasarkan Standar Akuntansi Kehutanan, perhitungan amortisasi beban

ditanggungkan, dan perbandingan harga pokok produksi menurut perusahaan dan Standar Akuntansi Kehutanan.

Bab keenam, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB III

### LANDASAN TEORI

#### 3.1 Pengertian Biaya

Akuntansi biaya mengukur sumber-sumber ekonomi yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa dalam satuan uang. Satuan pengukur yang digunakan untuk menyatakan nilai uang dari berbagai sumber ekonomi yang digunakan tersebut dikenal dengan istilah *cost*. Pemakaian istilah *cost* dalam akuntansi selalu dikaitkan dengan objek atau tujuan dari penggunaan sumber-sumber ekonomi. Objek penggunaan dari berbagai sumber ekonomi dapat berupa produk, jasa, fasilitas, kegiatan dan proyek.

Barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan memerlukan sumber ekonomi atau faktor produksi yang dapat diukur dalam satuan moneter. Dalam hal ini pengorbanan yang berhubungan dengan barang dan jasa yang diproduksi merupakan *cost* dari produk atau jasa yang bersangkutan. Sebaliknya pengorbanan yang tidak berhubungan dengan produk atau jasa yang dihasilkan bukan merupakan *cost* karena tidak memberikan manfaat.

Istilah *expense* menunjukkan nilai pengorbanan atau pengeluaran barang dan jasa yang 'ditandingkan' dengan pendapatan untuk menentukan rugi laba, sedangkan istilah biaya digunakan sehubungan dengan akumulasi data biaya untuk keperluan persediaan dan untuk penyesuaian laporan

keuangan. Istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan pengorbanan sumber ekonomi baik yang sudah terjadi maupun yang secara potensial akan terjadi adalah harga pokok dan laba rugi.

Terdapat beberapa pengertian atau definisi biaya yang masing-masing berbeda, meskipun tidak bertentangan satu sama lain.

Berikut ini Hamanto memberikan definisi tentang biaya:

"Biaya adalah jumlah yang dinyatakan dari sumber-sumber ekonomi yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu. Untuk mendapatkan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu, sebagai harga pokok dan beban dari sesuatu atau tujuan tertentu tersebut. Untuk mudahnya, biaya sebagai harga pokok dan sebagai beban."<sup>2)</sup>

Sebagai harga pokok, biaya dapat diukur atau merupakan harga pertukaran dari sumber ekonomi yang dikorbankan atau diserahkan untuk mendapatkan suatu barang dan jasa. Tetapi sering juga diukur berdasarkan harga pasar dari aktiva yang diperoleh.

Homgren berpendapat mengenai pengertian *cost*: "Cost is resources sacrificed or forgone to achieve a specific objective."<sup>3)</sup> Kita dapat menarik kesimpulan dari pengertian di atas bahwa *cost* merupakan pengorbanan untuk memperoleh objek tertentu. Pengertian *cost* belum memberikan

---

<sup>2)</sup> Hamanto, *Akuntansi Biaya: Perhitungan dan Penetapan Harga Pokok*, Edisi Pertama, Yogyakarta : BPFE UGM, 1992, hal 24.

<sup>3)</sup> Charles T. Homgren. *Cost Accounting : A Managerial Emphasis*, Sixth Edition (New Dehli : Prentice Hall International Inc. 1987) hal. 21.



"cost is significant primarily because it approximates fair value at date of acquisition. Cost is not of basic importance because it represent an amount paid, it is important as a measure of the value of what is acquired".<sup>4)</sup>

Defenisi di atas menjelaskan mengenai pentingnya cost sebagai ukuran nilai perolehan dan tidak pentingnya penyajian berdasarkan pada jumlah pembayaran, jika terjadi perubahan harga maka cost tidak berubah.

Selanjutnya menurut Polimeni adalah: "Cost is defined as the value of sacrifice made to acquire goods or services, measured in dollar by the reduction of asset or incurrence of liabilities at the time the benefits are required."<sup>5)</sup>

Menurut pengertian atau batasan di atas cost adalah nilai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh tujuan tertentu (barang atau jasa) yang diukur dalam satuan uang, juga dapat menyebabkan turunnya aktiva atau meningkatnya kewajiban untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian atau defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa cost adalah pengorbanan yang masih tetap melekat selama aktiva masih tersedia dan nilainya berdasarkan jumlah uang yang telah dikeluarkan untuk memperolehnya.

<sup>4)</sup> Vernon Kam. *Accounting Theory*, California: John Willey and Sons Inc. 1990. hal. 138.

<sup>5)</sup> Ralph S. Polimeni dkk. *Cost Accounting: Concept and Application for Managerial Decision Making*, third edition, New York: Mc. Graw-Hill Inc. 1991. hal. 13.

Pengertian *expense* menurut Polimeni adalah: "Expense defined as cost that has given a benefit and is now expired".<sup>6)</sup>

Pengertian tersebut mengungkapkan bahwa *expense* adalah *cost* yang telah memberikan manfaat dan disebut *expired cost*. Istilah tersebut digunakan jika aktiva yang semula disimpan sebagai persediaan dijual. Istilah lain dari *expired cost* adalah harga pokok penjualan.

Perusahaan manufaktur, disamping memperhatikan biaya-biaya yang berhubungan dengan pengadaan bahan baku sampai menjadi barang jadi, juga harus memperhatikan biaya-biaya yang berhubungan dengan operasional perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Oleh karena itu, Informasi biaya yang akurat sangat dibutuhkan oleh manajemen perusahaan untuk pengambilan keputusan.

### 3.2 Penggolongan Biaya

Fungsi akuntansi biaya pada umumnya merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem dan prosedur akuntansi. Pencatatan dan penggolongan biaya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Informasi biaya yang dihasilkan dari sistem dan prosedur akuntansi digunakan sebagai dasar pelaporan bagi pihak intern dan ekstern.

Informasi biaya disajikan untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Pemakai informasi biaya menyesuaikan kebutuhannya dengan informasi biaya. Teknik penyajian informasi biaya berpedoman pada konsep "Different cost for different purposes". Konsep tersebut berarti untuk tujuan penggunaan

---

<sup>6)</sup> *Op. cit.* hal. 14.



informasi yang berbeda, diperlukan klasifikasi biaya yang berbeda. Dengan demikian, suatu klasifikasi biaya tidak dapat digunakan untuk memenuhi berbagai tujuan. Jika pemakai memerlukan informasi biaya untuk tujuan yang berbeda, maka diperlukan informasi biaya dalam klasifikasi yang berbeda pula sesuai dengan tujuan penggunaan informasi biaya.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menggolongkan biaya. Penggolongan biaya tersebut tidak dapat ditetapkan mana yang terbaik, dalam arti dapat memenuhi semua kebutuhan. Hal ini disebabkan karena setiap perusahaan mempunyai karakteristik masing-masing.

Sebagai suatu sistem informasi, akuntansi biaya dituntut untuk memiliki kerangka acuan atau metodologi penggolongan biaya, yang jelas dan bersifat universal, sehingga dapat diaplikasikan pada setiap perusahaan atau organisasi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kerangka atau metodologi penggolongan biaya tersebut harus berpangkal atau mengacu pada kebutuhan manajemen akan informasi biaya. Apabila kebutuhan akan informasi biaya sebagai fokus, maka setiap perusahaan atau organisasi hanya dapat dibedakan oleh tiga macam kategori penggolongan biaya sebagai berikut:

- a. Objek-objek biaya untuk perhitungan harga pokok produksi dan penentuan laba rugi
- b. Objek-objek biaya untuk pengendalian manajemen

- c. Objek-objek biaya untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.

Beberapa metode penggolongan biaya akan tampak dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1**  
**Penggolongan Biaya**

NO	OBJEK BIAYA	ALTERNATIF METODE PENGGOLONGAN
1.	Biaya untuk perhitungan harga pokok produksi dan penentuan laba-rugi periodik	a. Biaya produksi dan non-produksi b. Elemen biaya produksi c. Biaya pesanan dan proses d. Biaya total dan biaya per unit
2.	Biaya untuk pengendalian manajemen	a. Biaya terkendali dan biaya tidak terkendali b. Biaya tetap dan biaya variabel c. Biaya historis dan biaya taksiran atau standar d. Biaya langsung dan biaya tidak langsung
3.	Biaya untuk perencanaan dan pengambilan keputusan	a. Biaya relevan b. Biaya masa lalu c. Biaya kesempatan d. Biaya tunai dan tidak tunai e. Biaya tetap dan biaya variabel f. Biaya marginal dan biaya differensial

Sumber: Mulyadi, Akuntansi Manajemen, hal. 92.



Tidak semua metode penggolongan biaya tersebut diperlukan oleh perusahaan. Namun untuk mengelola suatu perusahaan, manajemen tidak dapat menghindar dari kebutuhan untuk mengklasifikasi biaya yang terjadi berdasarkan salah satu atau lebih metode sesuai dengan kategori objek biaya tersebut di atas. Seperti yang tampak pada tabel, ada metode-metode penggolongan biaya yang diperlukan hanya untuk tujuan tertentu. Terdapat pula metode penggolongan biaya yang bermanfaat baik untuk perhitungan harga pokok produksi, pengendalian manajemen maupun untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Penggolongan biaya berdasarkan perilakunya terhadap perubahan volume kegiatan yang menggolongkan biaya ke dalam biaya tetap, biaya variabel dan biaya semivariabel merupakan contoh dari penggolongan biaya yang dimaksudkan.

Penggolongan informasi biaya menurut Mardiasmo dikelompokkan berdasarkan :

1. Fungsi kegiatan utama perusahaan
2. Pengaruh perubahan volume kegiatan terhadap biaya
3. Periode penentuan biaya
4. Pengaruh pengambilan keputusan terhadap biaya
5. Periode pembebanan biaya terhadap pendapatan
6. Dapat atau tidaknya biaya diidentifikasi terhadap objek biaya
7. Dapat atau tidaknya biaya dikendalikan

Uraian dari klasifikasi biaya tersebut disajikan sebagai berikut :

## 1. Fungsi kegiatan utama perusahaan.

Berdasarkan fungsi kegiatan utama perusahaan, biaya dibagi atas:

### a. Biaya produksi

Biaya produksi yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengolahan bahan baku menjadi produk selesai yang siap dijual.

Biaya produksi dikelompokkan menjadi :

#### - Biaya bahan baku

Biaya bahan baku adalah nilai uang dari penggunaan bahan yang diolah menjadi produk selesai.

#### - Biaya tenaga kerja

Biaya tenaga kerja adalah upah dari tenaga kerja yang mengerjakan proses produksi. Tenaga kerja yang mengerjakan pengolahan bahan baku menjadi produk selesai dikelompokkan menjadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung.

#### - Biaya *overhead*

Biaya *overhead* adalah semua biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.

### b. Biaya pemasaran

Biaya pemasaran adalah semua biaya yang berkaitan dengan kegiatan mulai dari pengenalan produk sampai dengan biaya penagihan hasil penjualan produk.

### c. Biaya administrasi dan umum

Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang berkaitan dengan fungsi pelayanan dalam administrasi dan umum.

d. Biaya keuangan

Biaya keuangan adalah semua biaya yang berkaitan dengan fungsi penyediaan dana, misalnya biaya administrasi bank, biaya bunga dan biaya provisi kredit.

2. Pengaruh perubahan volume kegiatan terhadap biaya

Berdasarkan pengaruh perubahan volume kegiatan terhadap biaya, biaya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Biaya variabel

Biaya variabel adalah biaya-biaya yang totalnya berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan.

b. Biaya tetap

Biaya tetap adalah biaya-biaya yang dalam rentang kapasitas tertentu totalnya tetap meskipun terjadi perubahan volume kegiatan, sedangkan biaya tetap per-unit jumlah berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan.

c. Biaya semivariabel

Biaya semivariabel adalah biaya yang total berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan. Total biaya semi variabel berubah secara tidak sebanding dengan perubahan volume

kegiatan karena biaya semivariabel mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel.

### 3. Periode penentuan biaya

Berdasarkan periode penentuan biaya, biaya diklasifikasikan sebagai berikut:

#### a. Biaya masa lalu

Biaya masa lalu adalah biaya-biaya yang telah terjadi di masa lalu.

#### b. Biaya masa akan datang

Biaya masa akan datang adalah biaya-biaya yang diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang. Biaya ini umumnya digunakan untuk perencanaan dan pengendalian biaya.

### 4. Pengaruh pengambilan keputusan terhadap biaya

Berdasarkan pengaruh pengambilan keputusan terhadap biaya, biaya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

#### a. Biaya relevan

Biaya relevan adalah biaya yang jumlahnya dipengaruhi oleh pilihan alternatif tindakan. Biaya relevan merupakan biaya masa yang akan datang, yang totalnya berbeda di antara alternatif tindakan yang satu dengan alternatif tindakan yang lain. Oleh karena itu biaya tersebut disebut biaya differensial.

#### b. Biaya tidak relevan

Biaya tidak relevan adalah biaya yang tidak terpengaruhi oleh pemilihan alternatif tindakan.

5. Periode pembebanan biaya terhadap pendapatan

Berdasarkan pengaruh periode pembebanan biaya terhadap pendapatan, biaya diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Biaya produk

Biaya produk adalah biaya yang secara langsung dapat diidentifikasi dengan produk yang dihasilkan, sehingga dengan jelas dapat diketahui hubungan antara pendapatan dengan biaya untuk menghasilkan produk yang dijual tersebut.

b. Biaya periode

Biaya periode adalah biaya yang tidak secara langsung berkaitan dengan produk yang dihasilkan dan umumnya langsung dibebankan sebagai biaya pada periode terjadinya biaya yang bersangkutan.

6. Dapat atau tidaknya biaya diidentifikasi terhadap objek biaya

Berdasarkan dapat atau tidaknya biaya diidentifikasi terhadap objek biaya, biaya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Biaya langsung

Biaya langsung adalah biaya yang secara langsung dapat diidentifikasi dengan objek biaya.

b. Biaya tidak langsung

Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung diidentifikasi dengan objek biaya.

#### 7. Dapat atau tidaknya biaya dikendalikan

Berdasarkan dapat atau tidaknya biaya dikendalikan, biaya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

##### a. Biaya terkendalikan

Biaya terkendalikan adalah biaya yang dapat dikendalikan atau dipengaruhi oleh keputusan manajer departemen yang bersangkutan.

##### b. Biaya tidak terkendalikan

Biaya tidak terkendalikan adalah biaya yang tidak dapat dikendalikan atau dipengaruhi oleh keputusan manajer departemen yang bersangkutan.

### **3.3 Pengertian Dan Tujuan Harga Pokok Produksi**

#### **3.3.1 Pengertian Harga Pokok Produksi**

Harga pokok adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang dan telah terjadi dan tujuannya untuk memperoleh aktiva atau secara tidak langsung untuk memperoleh pendapatan. Harga pokok disebut juga jumlah semua pengeluaran langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan perolehan, penyiapan dan penempatan persediaan yang akan digunakan untuk memperoleh pendapatan.

Abbas Kartadinata mengemukakan pendapatnya tentang harga pokok sebagai berikut:

1. Bagi suatu perusahaan perdagangan, harga pokok hanya mengandung satu unsur saja, yaitu harga beli produk-produk yang diperdagangkan.
2. Harga pokok produk jadi yang dihasilkan suatu perusahaan industri meliputi semua biaya dan pengorbanan yang diperlukan dan dilakukan untuk menghasilkan produk jadi, meliputi:
  - 1) Bahan baku dan bahan pembantu,
  - 2) Upah langsung,
  - 3) Biaya produksi tidak langsung.<sup>7)</sup>

Harga pokok produksi adalah gabungan dari tiga unsur biaya berikut ini:

1. Biaya bahan baku
2. Biaya tenaga kerja
3. Biaya overhead pabrik

Biaya bahan baku terdiri dari bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung adalah bahan baku yang menjadi bagian dari barang-barang yang diproduksi atau yang dapat diidentifikasi secara khusus dengan produk tertentu. Beberapa jenis bahan baku dan

---

<sup>7)</sup> Abbas Kartadinata. *Akuntansi Biaya: Suatu Pendekatan Terhadap Tingkah Laku Biaya*. Edisi revisi. Jakarta: Bina Aksara, 1985, hal. 15.

*supplies* yang penting untuk proses produksi tetapi tidak dapat diidentifikasi dengan barang-barang tertentu yang diproduksi atau yang biayanya relatif kecil yang sering disebut biaya *overhead* pabrik.

Biaya tenaga kerja dapat digolongkan menjadi biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah semua upah karyawan yang melaksanakan pekerjaan untuk barang-barang yang diproduksi. Upah karyawan bagian produksi yang tidak langsung mengerjakan barang diperlakukan sebagai biaya *overhead* pabrik. Biaya *overhead* pabrik termasuk semua biaya selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung.

### 3.3.2 Tujuan Harga Pokok Produksi

Penentuan harga pokok produksi mempunyai tujuan untuk mengetahui berapa besar biaya yang dikorbankan dalam hubungannya dengan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dipakai atau dijual. Dalam hal ini biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya *overhead* pabrik.

D. Hartanto mengemukakan bahwa tujuan penetapan harga pokok produksi adalah:

1. Sebagai alat untuk perencanaan
2. Sebagai alat untuk pengawasan
3. Sebagai alat untuk pengendalian biaya



4. Sebagai alat untuk memecahkan masalah khusus.<sup>8)</sup>

Perusahaan yang memproduksi massa, informasi harga pokok produksi yang dihitung dalam jangka waktu tertentu menurut Mulyadi, bermanfaat bagi manajemen untuk:

1. Menentukan harga jual produk
2. Memantau realisasi biaya produksi
3. Menghitung laba rugi periodik
4. Menghitung harga pokok persediaan produk jadi.<sup>9)</sup>

### 3.4 Tinjauan Teoritis Tentang Hutan

#### 3.4.1 Hutan Alam

Dilihat dari sudut pandang ekologi, hutan alam adalah suatu areal di atas permukaan tanah atau bumi yang ditumbuhi pohon-pohon yang rapat dan luas sehingga pohon-pohon, tumbuhan lainnya serta binatang dalam areal tersebut memiliki hubungan satu dengan yang lainnya; membentuk persekutuan hidup alam hayati dalam lingkungannya. Hutan menurut sudut pandang hukum adalah suatu areal permukaan tanah yang dinyatakan sebagai hutan oleh peraturan yang berlaku bagi suatu negara<sup>10)</sup>.

<sup>8)</sup> D. Hartanto. *Akuntansi Untuk Usahawan*. Edisi kelima. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI. 1981. hal. 34.

<sup>9)</sup> Mulyadi. *Akuntansi Biaya: Penentuan Harga Pokok dan Pengendalian Biaya*. Edisi ketiga. Yogyakarta: BPFE UGM. 1986. hal 45.

<sup>10)</sup> Mas'ud Junus, Ir,Dr. Dkk. *Dasar Umum Ilmu Kehutanan: Kegiatan Dalam Bidang Kehutanan*. Badan Kerja sama Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Timur. 1985.

Pengertian hutan menurut Ikatan Akuntan Indonesia adalah: "Suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan."<sup>11)</sup>

*Tahapan Pengelolaan Hutan Alam:*

#### I. Perencanaan Hutan

##### a. Inventarisasi Hutan

Inventarisasi hutan merupakan usaha untuk menggambarkan kuantitas dan kualitas dari tegakan hutan serta beberapa karakteristik dari tempat tumbuhnya. Dalam hal kualitas tegakan meliputi penaksiran luas areal berhutan, volume tegakan hutan, besarnya pertumbuhan (increment) serta penaksiran besarnya penebangan (etat). Tujuan inventarisasi hutan adalah mendapatkan data tentang areal yang berhutan dan massa serta komposisi tegakannya.

##### b. Pengukuran Hutan

Pengukuran hutan mencakup pengukuran areal hutan dan potensi hutan. Pengukuran potensi hutan meliputi pengukuran diameter pohon berdiri, pengukuran tinggi pohon, volume dan pengukuran riap.

##### c. Pemetaan Hutan (*landscaping*)

---

<sup>11)</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Op. Cit.* hal. 32. 16.

Peta hutan merupakan salah satu hasil dari inventarisasi. Ini berarti bahwa dengan peta diharapkan kita dapat mengetahui berapa banyak kayu yang tersedia dalam hutan dan di mana saja letaknya. Peta dibutuhkan dalam kegiatan survei dengan beberapa alasan: sebagai petunjuk penyusunan rencana penebangan, sebagai dasar penyusunan survei lapangan, sebagai dasar untuk mengadakan klarifikasi tegakan dalam strata menurut jenis tegakan dan umur tegakan.

#### d. Perencanaan dan Tata Hutan

Hal pokok yang perlu tercantum dalam setiap perencanaan hutan:

1. Tujuan pengelolaan harus diuraikan secara jelas dalam perencanaan.
2. Hasil inventarisasi sumber daya hutan (potensi).
3. Khusus untuk hutan produksi, perencanaan harus memuat pengaturan pemungutan/pemanenan serta bagan pemungutan.

## II. Pembinaan Hutan

### a. Permudaan Hutan

Di dalam hutan alam permudaan yang baik sangat penting artinya untuk mempertahankan kelestarian. Ada dua jenis permudaan: (1) permudaan alam, yaitu permudaan yang dilaksanakan oleh alam

sendiri, (2) permudaan buatan yaitu permudaan hutan dengan jenis-jenis tertentu, dalam usaha pembentukan suatu tegakan hutan. Pelaksanaan permudaan buatan meliputi: penyediaan biji persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemangkasan, penjarangan dan pemupukan.

#### b. Penanaman

Kegiatan penanaman meliputi transportasi bibit, persiapan lapangan tanaman, menanam dan pemeliharaan tanaman muda.

#### c. Pemeliharaan Hutan

Kegiatan pemeliharaan hutan meliputi:

1. Pembebasan pohon muda, dengan tujuan membantu pertumbuhan pohon-pohon muda dan permudaan jenis-jenis kayu perdagangan,
2. Pemangkasan, yaitu pemangkasan sebagian dahan untuk mendapatkan kayu yang tinggi dan tidak bermata,
3. Penjarangan, pohon-pohon yang berlebihan ditebang dengan maksud mengkonsentrasikan potensi produk kayu pada sejumlah pohon yang diseleksi.
4. Pemupukan, merupakan salah satu usaha untuk menyuburkan tanah.

### III. Perlindungan dan Pelestarian Hutan

#### a. Perlindungan Hutan

Perlindungan hutan merupakan usaha yang dilakukan untuk melindungi hutan dari berbagai penyebab kerusakan. Perlindungan hutan ditujukan untuk hutan alam dan hutan tanaman. Perlindungan hutan yang biasa dilakukan adalah dari hama hutan, kebakaran hutan, penggembalaan, gangguan manusia dan gangguan alam lainnya.

#### b. Pelestarian Alam

Konservasi sumber daya alam bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dalam keseimbangan, keselarasan dan keserasian. Konservasi sumber daya alam meliputi penyelamatan, pemeliharaan, pemulihan dan rehabilitasi.

#### IV. Pemanenan Hasil Hutan

Pemanfaatan dan pemungutan sumber daya alam dapat dilaksanakan melalui perusahaan hutan yang akan memberikan keuntungan bagi pembangunan negara, meningkatkan taraf hidup rakyat di sekitarnya, membangun kehutanan dan rehabilitasi/pembangunan tanah-tanah yang telah rusak/kritis.

Kegiatan pemanenan hasil hutan meliputi:

1. Pembukaan wilayah hutan
2. Pembuatan *base camp*, sebagai pusat kegiatan pengelolaan.
3. Inventarisasi tegakan hutan
4. Penebangan

5. Penyaradan, yaitu penarikan kayu dari petak tebangan
6. Pemenggalan batang
7. Pengupasan kulit
8. Penimbunan dan pengumpulan
9. Pengangkutan
10. Muat/bongkar

### 3.4.2 Hutan Tanaman Industri

Hutan tanaman industri (HTI) adalah tanaman yang dikelola dan diusahakan berdasarkan azas manfaat yang lestari, azas ekonomi dan azas perusahaan dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur yang intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri<sup>12)</sup>.

Hutan tanaman industri (HTI) diusahakan berdasarkan perpaduan prinsip ekonomi dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan serta sumber daya hutannya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial semaksimal mungkin. Pembangunan hutan tanaman industri diarahkan pada kawasan hutan produksi yang telah gundul. Prioritasnya terutama pada lahan kosong, padang alang-alang dan semak belukar.<sup>13)</sup>

Ciri-ciri pokok hutan tanaman industri:

- a. Komposisi jenisnya murni atau campuran,

---

<sup>12)</sup> Anonim. *Peningkatan HTI dalam Pelita V*. Jakarta: Dirjen Reboisasi Hutan. 1989.

<sup>13)</sup> Khaeruddin. *Butir-butir Tata Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.



- b. Potensi produksinya tinggi, begitu pula kuantitas maupun kualitasnya, yang dipakai dengan penerapan silvikultur intensif,
- c. Sistem silvikultur yang ditetapkan adalah tebang habis dengan penanaman kembali atau tebang pilih dan tanam jalur dalam lokasi HTI di areal bekas tebangan.
- d. Pengusahaan HTI adalah pengusahaan hutan dalam suatu kawasan hutan yang meliputi kegiatan pembibitan, penanaman, pemeliharaan tegakan, pemungutan hasil hutan, pengolahan dan pemasaran.

#### *Tahapan Pengelolaan Hutan Tanaman Industri:*

##### **I. Perencanaan**

###### **a. Penetapan Lokasi**

Untuk memperoleh kepastian tentang status areal diperlukan adanya potret udara atau citra satelit. Setelah diperoleh hasil citra satelit atau penafsiran potret udara, gambaran calon lokasi HTI diplotkan dengan peta tematik untuk memperoleh gambaran lebih pasti.

###### **b. Pembagian Unit Lahan**

Pembagian unit lahan adalah mengalokasikan areal menjadi bagian-bagian areal yang memiliki kondisi lingkungan spesifik dan homogen. Tujuannya adalah untuk keperluan penyusunan rencana dan pengaturan peruntukan lahan/tata ruang serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kesesuaian lahan.

### c. Penilaian Kesesuaian Lahan

Cara penilaian calon areal HTI yang belum memiliki peta kesesuaian lahan terhadap jenis pohon yang akan dikembangkan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: (1) membandingkan antara persyaratan tumbuh pohon dengan kualitas/sifat lahan yang dimiliki lokasi/areal penanaman, (2) menggunakan data hasil uji jenis pohon.

### d. Penataan Areal Kerja

Penataan areal kerja adalah pembagian areal kerja yang menjadi bagian-bagian areal sesuai dengan peruntukannya, untuk keperluan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan perusahaan hutan. Tujuan penataan areal kerja adalah untuk memudahkan pengaturan administrasi pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kerja.

### e. Pembukaan Wilayah

Pembukaan wilayah untuk menyediakan prasarana jaringan jalan angkutan dan bangunan hutan lainnya untuk menjamin kelancaran dan kemudahan pelaksanaan kegiatan pengolahan hutan.

### f. Organisasi dan Tenaga Kerja

Untuk mencapai tujuan pembangunan HTI secara efisien, diperlukan suatu organisasi dan tenaga kerja yang dapat mendukung kelancaran seluruh pekerjaan pembangunan HTI.



## II. Persiapan

### a. Pengadaan Benih

Pengadaan benih adalah proses kegiatan mulai pengumpulan benih, ekstraksi benih, pengujian dan penyimpanan benih.

### b. Pengadaan Bibit

Pengadaan bibit merupakan kegiatan yang meliputi penyiapan tempat pembibitan, pengadaan sarana dan prasarana serta kegiatan lain yang berhubungan dengan pengadaan bibit.

## III. Penanaman

Penanaman dilakukan pada setiap petak berdasarkan rencana penanaman yang telah ditetapkan. Kegiatan penanaman meliputi: persiapan lapangan penanaman, pengangkutan bibit, penetapan pola tanam, waktu penanaman dan konservasi tanah.

## IV. Pemeliharaan

Pemeliharaan dilakukan setelah penanaman, yang meliputi:

1. Penyulaman tanaman, yaitu penanaman kembali bagian yang kosong bekas tanaman yang mati/rusak.
2. Pengendalian gulma, yaitu mengurangi populasi gulma yang dapat mengganggu pertumbuhan pohon.
3. Pendangiran tanaman, yaitu kegiatan penggemburan tanah di sekitar tanaman dalam upaya memperbaiki fisik tanah.

4. Pemupukan, yaitu tindakan memberikan tambahan unsur-unsur hara pada kompleks tanah, baik langsung maupun tidak langsung dapat menyumbangkan bahan makanan pada tanaman.
5. Pemangkasan cabang, yaitu kegiatan pembuangan cabang bagian bawah untuk memperoleh batang bebas cabang yang panjang dan bebas mata kayu.

#### V. Perlindungan Hutan

##### a. Pengendalian Hama Penyakit

Pengendalian hama penyakit pada dasarnya adalah tindakan untuk mengatur populasi penyebab hama agar tidak menimbulkan kerusakan ekonomi berarti.

##### b. Pengendalian Kebakaran Hutan

Pengendalian kebakaran hutan adalah kegiatan persiapan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan. Tujuan pengendalian kebakaran hutan melalui usaha pencegahan dan penekanan sekecil mungkin terjadinya kebakaran hutan.

#### VI. Penjarangan Tegakan

Penjarangan tegakan adalah tindakan pengurangan jumlah batang persatuan luas untuk mengatur kembali ruang tumbuh pohon dalam rangka mengurangi persaingan antar pohon dan meningkatkan kesehatan pohon dalam tegakan. Penjarangan tegakan bertujuan untuk memacu

pertumbuhan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas tegakan agar diperoleh tegakan hutan dengan massa kayu dan kualitas kayu yang tinggi sehingga dapat memberikan penghasilan yang tinggi.

### 3.4.3 Karakteristik Perusahaan Pengusahaan Hutan

Perusahaan pengusahaan hutan mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan perusahaan manufaktur. Adapun karakteristik tersebut adalah:

- Proses produksi hasil hutan untuk mendapatkan kayu bulat memerlukan waktu yang panjang, dimulai dari penanaman, pemeliharaan, dan pemungutan, bergantung dari tiap riap (growth) tegakan hutan yang akan ditentukan oleh rotasi atau daur tanaman. Untuk hutan alam dengan silvikultur TPTI diperlukan rotasi tebang 35 tahun. Sedangkan untuk hutan tanaman, daur ditetapkan sesuai dengan kelas perusahaan atau jenis tanaman yang diusahakan untuk *fast growing species*, daur ekonomis paling cepat 8 tahun.
- Pengertian hasil dalam perusahaan hutan meliputi :
  - 1) Hasil tebangan,
  - 2) Hasil olahan,
  - 3) Hasil hutan lainnya.

Setiap proses pengusahaan masing-masing hasil adalah spesifik dan memiliki karakteristik khusus.

- Perusahaan pengusahaan hutan, seperti pemegang HPH/HPTI memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan (penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengolahan, dan pemasaran) dan pengolahan areal HPH/HPTI yang memiliki : fungsi perencanaan pengusahaan hutan, pengorganisasian perusahaan hutan, pendayagunaan tenaga teknis kehutanan dan tenaga profesional pendukung kegiatan pengusahaan hutan, perlindungan, serta pengawasan hutan.

### **3.5 Komponen Biaya yang membentuk Harga Pokok Produk pada Perusahaan Pengelola HPH**

Untuk mendapatkan harga pokok suatu produk secara layak dan teliti haruslah terlebih dahulu diketahui unsur-unsur biaya apa saja yang seharusnya dimasukkan ke dalam perhitungan harga pokok tersebut. Dengan demikian, perhitungan harga pokok suatu produk nantinya tidak terdapat kekeliruan.

Perusahaan perkayuan, dalam hal ini perusahaan pengelola Hak Pengusahaan Hutan (HPH) berbeda dengan perusahaan manufaktur. Pada perusahaan pengelola HPH tidak terjadi perubahan bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi seperti pada perusahaan manufaktur. Pada perusahaan pengelola HPH yang terjadi adalah proses dari kayu yang sebelumnya masih berupa hutan alam menjadi kayu bulat yang siap dijual.

Menurut Standar Akuntansi Kehutanan, yang dijelaskan di muka, unsur harga pokok produk kayu tebangan adalah:

- a. Biaya yang berhubungan dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
- b. Biaya yang berhubungan dengan kegiatan penanaman pada hutan alam
- c. Biaya yang berhubungan dengan usaha pemeliharaan dan pembinaan hutan
- d. Pengadaan sarana pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan (pengerahan tenaga, penggunaan bahan, perlengkapan dan premi asuransi kebakaran)
- e. Biaya yang berhubungan dengan pemungutan hasil hutan
- f. Pemenuhan kewajiban finansial terhadap negara
- g. Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan bina desa/Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH)
- h. Biaya yang berhubungan dengan pembangunan sarana dan prasarana.

### **3.6 Perlakuan Akuntansi Terhadap Harga Pokok Produksi Kayu Tebangan Menurut Standar Akuntansi Kehutanan**

Perlakuan akuntansi untuk kegiatan yang berkaitan dengan produksi kayu tebangan dan hasil hutan lainnya dijelaskan sebagai berikut:

#### **I. Perencanaan**

Biaya-biaya yang berhubungan dengan perolehan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) termasuk iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Biaya penyusunan Rencana Karya Pengusahaan Tahunan (RKPH) dan Rencana Karya Lima Tahunan (RKL) dikapitalisasi secara terpisah sebagai beban ditanggungkan dan diamortisasikan selama masa manfaatnya sebagai biaya produksi.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan penyusunan RKT dimasukkan sebagai biaya produksi dalam tahun berjalan.

## II. Penanaman

Biaya yang berhubungan dengan kegiatan penanaman pada hutan alam dibebankan sebagai biaya produksi hasil hutan. Sedangkan biaya berhubungan dengan usaha penanaman bukan untuk diproduksi, misalnya penanaman untuk hutan lindung, disajikan sebagai beban-beban lain-lain.

Biaya yang timbul sebagai akibat kegiatan perusahaan hutan seperti :

- (a). Biaya penanaman kembali untuk jalur tebang yang telah diproduksi.
- (b). Biaya penanaman tanah kosong
- (c). Biaya penanaman kiri-kanan jalan
- (d). *Landscaping*
- (e). Biaya penanaman hutan lindung.

Pada hutan tanaman industri:

- a. Apabila tidak tersedia pohon siap tebang, maka biaya yang berhubungan dengan usaha penanaman dikapitalisasi sebagai "Hutan Tanaman Industri (HTI) dalam pengembangan" sampai umur siap tebang dan diamortisasi selama jangka waktu masa konsesi. Amortisasi dimulai sejak penebangan dilakukan serta dibukukan sebagai biaya produksi. Amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- b. Apabila tersedia pohon siap tebang, maka biaya tersebut dibukukan sebagai biaya produksi.

### III. Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan

Biaya yang berhubungan dengan usaha pemeliharaan dan pembinaan hutan dibebankan sebagai biaya produksi. Kewajiban yang timbul sehubungan dengan pemeliharaan dan pembinaan hutan yang belum dilaksanakan sampai tanggal pelaporan, harus diestimasi dan disajikan sebagai bagian dari kewajiban.

Pada hutan tanaman industri:

- a. Apabila tidak tersedia pohon yang siap tebang, maka biaya yang berhubungan dengan usaha pemeliharaan dan pembinaan hutan dikapitalisasi sebagai "HTI dalam pengembangan" sampai umur siap tebang dan diamortisasi selama jangka waktu masa konsesi. Amortisasi dimulai sejak penebangan dilakukan serta dibukukan sebagai biaya produksi.

Amortisasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.

- b. Apabila tidak tersedia pohon siap tebang, biaya yang berhubungan dengan usaha pemeliharaan dan pembinaan hutan tersebut dibukukan sebagai biaya produksi.

#### IV. Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan

Pembangunan dan pengadaan sarana pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan meliputi pembangunan menara api, pos jaga, pembuatan liharan api dan pengadaan mobil kebakaran dikapitalisasi sebagai biaya yang ditangguhkan dan disusutkan selama masa manfaat maksimum sampai masa akhir konsensi.

Biaya yang berhubungan dengan kegiatan pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan meliputi pengerahan tenaga, penggunaan bahan, perlengkapan dan premi asuransi kebakaran dibebankan sebagai biaya produksi.

Kewajiban yang timbul sehubungan dengan pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan dan sebelumnya dilaksanakan pada tanggal neraca, harus diestimasi dan disajikan sebagai biaya produksi pada periode berjalan secara akrual.

#### V. Pemungutan Hasil Hutan

Biaya yang berhubungan dengan pemungutan hasil hutan dibebankan sebagai biaya produksi. Biaya yang berhubungan dengan pemungutan hasil



hutan antara lain biaya tenaga kerja, biaya bahan bakar.

#### VI. Pemenuhan Kewajiban Terhadap Negara

Kewajiban perusahaan/pengusahaan hutan terhadap negara antara lain: kewajiban teknis dan kewajiban finansial. Kewajiban teknis meliputi, tetapi tidak terbatas pada Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Rencana Kelolah Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Kewajiban finansial meliputi, tetapi tidak terbatas pada Iuran Hasil Hutan (IHH), Biaya Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (BPPHH), Dana Reboisasi (DR) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Areal.

Biaya yang berhubungan dengan penyusunan AMDAL, RPL, dan RKL dikapitalisasi sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya sebagai biaya produksi. Biaya yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban finansial, seperti DR, IHH, BPPHH, dan PBB areal dibebankan sebagai biaya produksi dengan menggunakan dasar akrual.

#### VII. Pemenuhan Kewajiban Lingkungan dan Sosial

Kewajiban terhadap lingkungan dan sosial antara lain mencakup Bina Desa Hutan/Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH). Biaya yang berhubungan dengan Studi Diagnostik Bina Desa Hutan/PMDH dibukukan sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya

sebagai biaya produksi. Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Bina Desa Hutan/PMDH dibebankan sebagai biaya produksi tahun berjalan.

#### VIII. Pembangunan Sarana dan Prasarana

Biaya pembangunan jalan induk dan jalan cabang dikapitalisasi dan disusutkan selama masa manfaatnya dan dibukukan sebagai biaya produksi. Biaya pembangunan jalan ranting (jalan sarad) dibebankan sebagai biaya produksi.

#### 3.7 Accretion

Berhubungan dengan laporan pendapatan selama produksi, pengakuan peningkatan nilai yang timbul dari pertumbuhan secara alami atau proses pertambahan umur. Pertumbuhan atau proses pertambahan umur merupakan bagian dari proses produksi bila dilihat dari sudut ekonomi, yang kemudian memberikan peningkatan pendapatan. Contoh dari proses tersebut adalah pertumbuhan kayu, ternak, dan pertambahan umur minuman keras tertentu dan anggur. Istilah proses pertumbuhan/pertambahan umur disebut *accretion*.<sup>14)</sup>

Keterbatasan *accretion* adalah sulit untuk menetapkan *present discount value*, karena tergantung pada harga pasar di masa depan, biaya

---

<sup>14)</sup> Hendriksen S, Eldon dan Michael F, Van Breda. *Accounting Theory*. Boston: Irwin. 1992. hal. 305.

yang dikeluarkan untuk pertumbuhan kayu, biaya pemungutan hasil hingga produk siap dijual.



## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **4.1 Sejarah Singkat Perusahaan**

PT Bina Mahawana Wisesa berdiri pada tanggal 6 April 1989. Perusahaan didirikan dengan Akte Notaris No.189 yang dibuat oleh Sutjipto S.H di Jakarta. Pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2 2346.HT.01.04 tahun 1989.

Perusahaan bergerak dalam bidang pemungutan hasil hutan (*log*). Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 369 / Kpts-IV / 1990 tertanggal 19 Juli 1990, PT Bina Mahawana Wisesa diberikan Hak Pengusahaan Hutan seluas 130.000 hektar di Kabupaten Kolaka dengan masa konsesi 35 tahun.

Jumlah staf 75 orang, supervisor delapan orang, empat manajer dan satu orang manajer umum. Personil yang ada di lapangan sebanyak 450 orang. Tingkat pendidikan karyawan SD, SLTP, SMU, SMK, Sarjana dengan usia rata-rata 24-40 tahun.

#### **4.2 Struktur Organisasi**

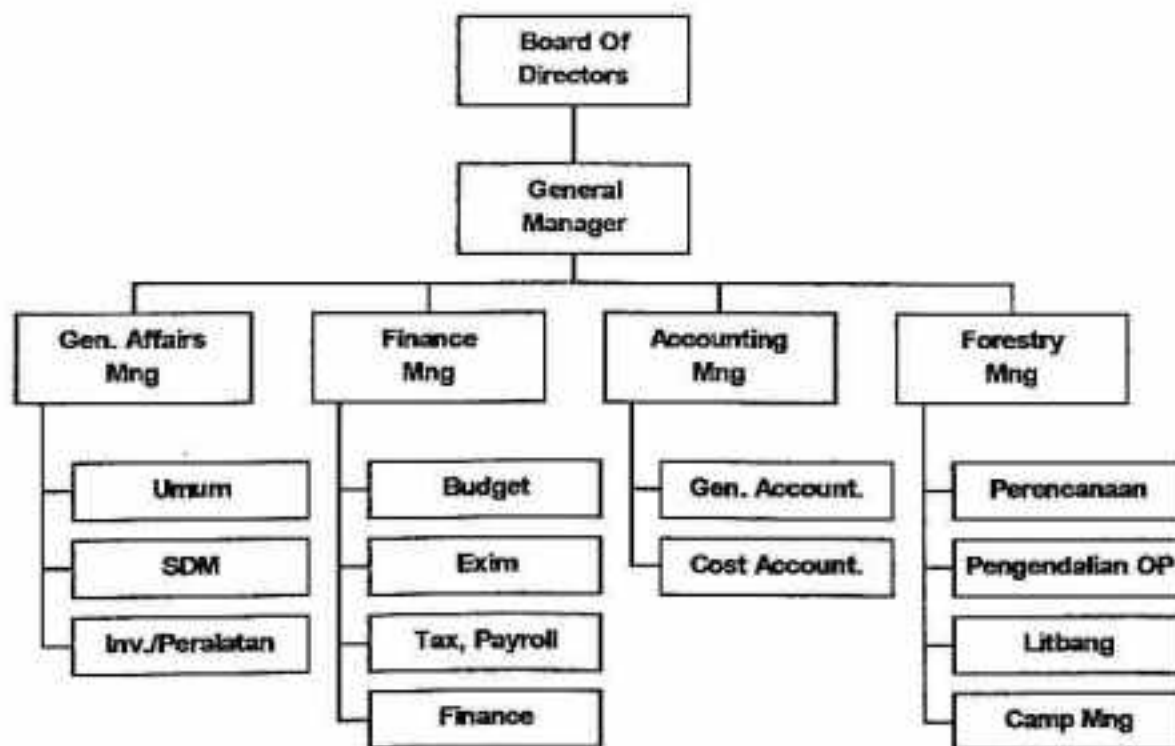
PT Bina Mahawana Wisesa merupakan perusahaan yang di dalamnya melibatkan banyak personil sehingga diperlukan struktur organisasi yang

memadai, untuk mencegah kesimpangsiuran dan kesemrawutan dalam pelaksanaan tugas masing-masing bagian.

Tugas dan tanggung jawab dari tiap bagian dalam organisasi adalah:

### SKEMA 1

#### Struktur Organisasi PT Bina Mahawana Wisesa Tahun 1999



Sumber : PT Bina Mahawana Wisesa

1. *General Manager*, dengan tugas:

- Mengawasi tugas dan tanggung jawab semua manajer.
- Mengadakan hubungan dengan pemerintah menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan.
- Secara periodik mengadakan rapat tentang segala masalah yang dianggap perlu.
- Memutuskan segala sesuatu yang menyangkut kelancaran perusahaan dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas perusahaan baik intern maupun ekstern.

2. *General Affairs Manager*, dengan tugas:

- Bertanggung jawab terhadap urusan ketenagakerjaan
- Melakukan penempatan karyawan sesuai *job* dan keterampilan masing-masing.
- Membuka peluang bagi para karyawan untuk pengembangan karir.
- Melakukan pembinaan dan pengembangan keterampilan karyawan.

3. *Finance Manager*, dengan tugas:

- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan perusahaan.

- Membuat rincian atau pembukuan mengenai arus masuk dan arus keluar uang.
- Menerima dan mencairkan harga penjualan.

4. *Accounting Manager*, dengan tugas:

- Membuat laporan keuangan untuk keperluan perusahaan, baik yang bersifat intern maupun ekstern.
- Bertanggung jawab terhadap seluruh pencatatan dan penerbitan catatan keuangan perusahaan.

5. *Forestry Manager*, dengan tugas:

- Bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas yang ada pada HPH.
- Bertanggung jawab atas mutu dan target pencapaian produksi kayu *logs*

### 4.3 Proses Perolehan Kayu Bulat

Berbeda dengan *Saw Mill* dan *Moulding*, kayu *logs* diperoleh dari kayu yang masih alami dengan melakukan eksploitasi langsung ke areal HPH. Perolehan kayu *logs* meliputi beberapa tahapan kegiatan, yaitu:

a. Penataan Areal Kerja

Penataan areal kerja adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengatur blok kerja tahunan dan petak kerja guna perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Unit Pengelolaan Hutan. Penataan areal kerja

dimaksudkan untuk memberikan tanda batas yang nyata di lapangan pada Unit Pengolahan Hutan, blok kerja tahunan dan petak kerja sehingga pelaksanaan setiap kegiatan perusahaan hutan dapat dilaksanakan dengan baik. Di samping itu juga untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan hutan pada areal HPH tersebut. Tujuan kegiatan ini adalah mengatur areal kerja sehingga kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan perusahaan berjalan dengan tertib dan efisien. Kegiatan penataan areal meliputi penataan blok, petak, jalur koservasi dan jalur tebang serta jalan hutan.

b. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)

Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan adalah kegiatan pencatatan, pengukuran dan penandaan pohon pada areal blok kerja tahunan untuk mengetahui data pohon, data pohon yang dilindungi, data pohon yang akan ditebang dan data medan kerja. Maksud kegiatan ini adalah untuk mengetahui keadaan penyebaran pohon dalam tegakan, yang meliputi jumlah dan komposisi jenis serta volume pohon yang akan ditebang. Di samping itu untuk mengetahui jumlah dan jenis pohon inti dan pohon yang dilindungi yang akan dipelihara sampai dengan rotasi berikutnya. Kegiatan ITSP bertujuan untuk mengetahui data penyebaran pohon yang akan ditebang serta data jumlah dan komposisi pohon yang akan ditinggalkan di lapangan untuk dipelihara sampai rotasi berikutnya.



c. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)

Pembukaan Wilayah hutan adalah kegiatan penyediaan prasarana wilayah bagi produksi kayu, pembinaan hutan, perlindungan hutan, inspeksi kerja, transportasi sarana kerja dan komunikasi antar pusat kegiatan. Maksud pembukaan wilayah hutan adalah untuk merencanakan pembuatan jalan angkut dan prasarana lainnya yang berkaitan erat dengan kegiatan perusahaan untuk menyiapkan jalan angkutan dan prasarana lainnya. Dengan adanya jalan angkutan akan menunjang kelancaran angkutan produksi hasil hutan dari masing-masing blok tebangan.

d. Penebangan /Produksi

Penebangan adalah kegiatan pengambilan kayu dari pohon-pohon dalam tegakan yang berdiameter sama dengan atau lebih besar dari diameter batas yang ditetapkan. Maksud kegiatan penebangan ini adalah melaksanakan pemanfaatan kayu secara optimal dari blok tebangan yang telah disahkan atas pohon-pohon yang berdiameter lebih besar dari batas diameter yang telah ditetapkan dan meminimalkan kerusakan terhadap tegakan tinggal. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan hasil keuntungan perusahaan berupa kayu dengan jumlah dan mutu yang memenuhi persyaratan.

e. Penyaradan dan Pengangkutan

Penyaradan adalah pengambilan kayu dari tempat penebangan untuk dibawa ke Tempat Penimbunan Kayu (TPn). Tipe penyaradan yang

digunakan adalah penyaradan dengan tenaga mesin. Arah jalan sarad ditentukan sesuai arah jalur menuju jalan cabang. Penyaradan diupayakan tidak merusak pohon-pohon pelindung tanaman yang ditinggalkan dan tidak melalui jalan konservasi. Arah menyarad hanya melewati satu jalan sarad yang ditetapkan dari tempat rebahnya pohon sampai dengan Tempat Penimbunan Kayu (TPn) dalam jalur terbang. Pengangkutan kayu dilakukan dengan *Logging Trailer* mulai dari Tempat Pengumpulan Kayu (*Log Yard*) di petak-petak terbang sampai di *Log Pond*.

Dari keseluruhan proses di atas, maka kayu tersebut sudah dapat dipasarkan.

#### **4.4 Komponen Biaya yang membentuk Harga Pokok Kayu Tebangan pada PT Bina Mahawana Wisesa**

PT Bina Mahawana Wisesa sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perusahaan hutan mempunyai kekhususan dalam proses produksinya. Seperti telah dijelaskan di atas, proses produksi kayu *logs* berbeda dengan perusahaan pengolahan (manufaktur). Hal ini disebabkan sifat produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini, yaitu kayu *logs* baru dapat diketahui harga pokoknya setelah kayu *logs* tersebut telah ditebang dan diangkut sampai di *Log Pond*.

Untuk mengetahui unsur-unsur harga pokok kayu *logs*, akan diperlihatkan pada skema 2 berikut:

## SKEMA 2

### Unsur-unsur Biaya Kayu Logs PT Bina Mahawana Wisesa

---

Biaya-biaya yang terjadi dalam rangka memproduksi kayu logs:

- Tenaga kerja langsung
- Grading fee (BPPHH)
- Suku cadang
- Bahan bakar
- Biaya *loading*
- Sewa pangkalan
- Biaya tenaga kerja tidak langsung
- Biaya perbaikan dan pemeliharaan alat berat
- Biaya penanaman hutan alam
- Biaya penanaman hutan lindung
- Biaya *landscaping*
- Biaya pembinaan & pemeliharaan hutan
- Biaya asuransi kebakaran
- By. pengendalian kebakaran
- Biaya pengamanan hutan
- Biaya penyusutan
- Biaya amortisasi perolehan dan IHPH
- Biaya amortisasi RKPH
- Biaya amortisasi RKL
- Biaya amortisasi studi diagnostik PMDH
- Biaya amortisasi amdal
- Biaya amortisasi rencana kelola lingkungan
- Biaya amortisasi rencana pemantauan lingk.
- Biaya rencana karya tahunan
- Biaya listrik dan air
- Biaya komunikasi
- Biaya bina desa hutan
- Dana reboisasi
- Iuran hasil hutan
- Pajak bumi dan bangunan
- By. pembuatan jalan & jembatan
- By. gaji pegawai
- By. keperluan *camp*
- By. Keperluan kantor

---

Sumber: PT Bina Mahawana Wisesa

## BAB V

### PEMBAHASAN

PT Bina Mahawana Wisesa sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengusahaan hutan mempunyai kekhususan dalam proses produksinya. Proses produksi kayu *logs* berbeda dengan perusahaan pengolahan (manufaktur). Hal ini disebabkan sifat produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini. Kayu *logs* baru dapat diketahui harga pokoknya setelah kayu *logs* tersebut ditebang dan diangkut sampai di *Log Pond*.

Unsur-unsur biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memproduksi *logs*, akan diperlihatkan pada skema 3 berikut:

## SKEMA 3

Unsur-unsur Biaya Kayu Logs  
PT Bina Mahawana Wisesa

---

Biaya-biaya yang terjadi dalam rangka memproduksi kayu logs:

- Tenaga kerja langsung
- Grading fee (BPPHH)
- Suku cadang
- Bahan bakar
- Biaya *loading*
- Sewa pangkalan
- Biaya tenaga kerja tidak langsung
- Biaya perbaikan dan pemeliharaan alat berat
- Biaya penanaman hutan alam
- Biaya penanaman hutan lindung
- Biaya *landscaping*
- Biaya pembinaan & pemeliharaan hutan
- Biaya asuransi kebakaran
- By. pengendalian kebakaran
- Biaya pengamanan hutan
- Biaya penyusutan
- Biaya amortisasi perolehan dan IHPH
- Biaya amortisasi RKPH
- Biaya amortisasi RKL
- Biaya amortisasi studi diagnostik PMDH
- Biaya amortisasi amdal
- Biaya amortisasi rencana kelola lingkungan
- Biaya amortisasi rencana pemantauan lingk.
- Biaya rencana karya tahunan
- Biaya listrik dan air
- Biaya komunikasi
- Biaya bina desa hutan
- Dana reboisasi
- luran hasil hutan
- Pajak bumi dan bangunan
- By. pembuatan jalan
- By. gaji pegawai
- By. keperluan *camp*
- By. Keperluan kantor

---

Sumber: PT Bina Mahawana Wisesa

## 5.1 Identifikasi dan Klasifikasi Biaya Produksi

Untuk mengetahui harga pokok, perlu diketahui seluruh biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan barang atau jasa. Jumlah biaya tergantung pada penggunaan faktor-faktor produksi yang diikutsertakan dalam proses produksi. Berikut ini adalah komponen biaya yang dikeluarkan oleh PT Bina Mahawana Wisesa selama tahun 1999.

### I. Perencanaan

Kegiatan perencanaan merupakan hal yang sangat vital dalam pengelolaan suatu perusahaan. Kesalahan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan proses perencanaan dapat mengancam kestabilan perusahaan dalam menghadapi persaingan dunia usaha.

Biaya perencanaan Hak Pengusahaan Hutan menurut Standar Akuntansi Kehutanan terdiri atas:

1. Perolehan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)
2. Penyusunan Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
3. Penyusunan Rencana Karya Lima Tahunan (RKL)
4. Penyusunan Rencana Karya Tahunan (RKT).



Tabel 2  
Biaya Perencanaan  
Tahun 1999  
(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Biaya	Jumlah
1	Amortisasi perolehan dan iuran HPH	299.113.958
2	Amortisasi rencana karya perusahaan hutan	1.619.147
3	Amortisasi rencana karya lima tahunan	4.469.525
4	Rencana karya tahunan	5.725.600
	Jumlah	310.928.230

Sumber: PT Bina Mahawana Wisesa (data telah diolah)

PT Bina Mahawana Wisesa memperlakukan komponen biaya perencanaan sebagai beban ditanggungkan dan beban tahun berjalan. Komponen biaya perencanaan yang diperlakukan sebagai beban ditanggungkan di antaranya biaya yang berhubungan dengan perolehan Hak Perusahaan Hutan, biaya Rencana Karya Lima Tahunan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan Rencana Karya Perusahaan Hutan. Biaya yang diperlakukan sebagai beban tahun berjalan adalah biaya yang berhubungan dengan penyusunan rencana karya tahunan (RKT). Biaya-biaya yang diperlakukan sebagai beban ditanggungkan diamortisasi selama masa manfaatnya dan dimasukkan sebagai unsur biaya produksi.

## II. Biaya Penanaman

Kegiatan penanaman merupakan salah satu komponen biaya yang diperhitungkan dalam proses penentuan biaya produksi. Komponen biaya

penanaman meliputi kegiatan penanaman pada hutan produksi (hutan alam) dan pada hutan bukan produksi (hutan lindung).

Biaya penanaman terdiri dari:

1. Biaya penanaman kembali jalur tebang yang telah diproduksi, meliputi:
  - a. Pembuatan gubuk kerja
  - b. Pembuatan papan lokasi
  - c. Pembersihan jalur tebang
  - d. Pengadaan ajir
  - e. Pemasangan ajir dan pembuatan lobang tanam
  - f. Pengangkutan bibit dan penanaman
2. Biaya penanaman tanah kosong, meliputi:
  - a. Pembuatan gubuk kerja
  - b. Pembuatan papan lokasi
  - c. Pembersihan jalur tebang
  - d. Pengadaan ajir
  - e. Pemasangan ajir dan pembuatan lobang tanam
  - f. Pengangkutan bibit dan penanaman
3. Biaya penanaman kiri kanan jalan, meliputi:
  - a. Pembuatan gubuk kerja
  - b. Pembuatan papan lokasi
  - c. Pembersihan jalur tebang



- d. Pengadaan ajir
- e. Pemasangan ajir dan pembuatan lobang tanam
- f. Pengangkutan bibit dan penanaman

4. Biaya *landscaping*

Tabel 3  
Biaya Penanaman Hutan Alam  
Tahun 1999  
(Dalam Rupiah)

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Penanaman jalur tebang yang sudah diproduksi	67.250.000
2	Penanaman tanah kosong	41.354.000
3	Penanaman kiri-kanan jalan	33.150.000
4	<i>Landscaping</i>	5.325.300
Jumlah		147.079.300

PT Bina Mahawana Wisesa memasukkan semua biaya yang berhubungan dengan penanaman sebagai komponen biaya produksi. Berdasarkan Standar Akuntansi Kehutanan biaya penanaman hutan lindung sebesar Rp 36.297.000 tidak diperlakukan sebagai biaya produksi. Biaya yang dibebankan sebagai biaya produksi hanyalah biaya yang berhubungan dengan kegiatan penanaman pada hutan alam sebesar Rp 147.079.300.

III. Biaya Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan

TABEL 4

**PT BINA MAHAWANA WISESA  
BIAYA PENANAMAN JALUR TEBANG YANG TELAH DIPRODUKSI  
TAHUN 1999  
(Dalam Ribuan Rupiah)**

NO	JENIS KEGIATAN	FISIK	BULAN												Jumlah s/d Des 1999					
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec						
1	Persiapan a. Pembuatan gubuk kerja b. Pembuatan papan lokal c. Pembersihan jalur tebang d. Pengadaan ajir	2 bh 3 bh 150 km 140.000 bg				500 500 600					2800	1000						9600 1500 1200	7500	500 500 17000 8100
2	Penanaman a. Luas penanaman b. Pemasangan ajir dan pembuatan lubang tanam c. Pengangkutan bibit/penanaman	1200 ha 140.000 bg 140.000 bg							4300									3000 9600	4600 9750	19300 21950
<b>JUMLAH</b>						1600			4300	2800	1000				8700	9800	18500	20750	67250	

Sumber: PT Bina Mahawana Wisesa (data telah dilatih)

TABEL 5

**PT BINA MAHAWANA WISESA  
BIAYA PENANAMAN TANAH KOSONG  
TAHUN 1999  
(Dalam Ribuan Rupiah)**

NO	JENIS KEGIATAN	FISIK	BULAN												Jumlah s/d Des 1999					
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec						
1	Persiapan a. Pembuatan gubuk kerja b. Pembuatan papan lokal c. Pembersihan jalur tanaman d. Pengadaan ajir	2 bh 3 bh 45 km 80.000 bg				600 750 3250												2650 1150	1000 1500	500 750 12350 10850
2	Penanaman a. Luas penanaman b. Pemasangan ajir dan pembuatan lubang tanam c. Pengangkutan bibit/penanaman	450 ha 80.000 bg 80.000 bg			1500					2100	2350							6600 9500	2630 1124	6030 10674
<b>JUMLAH</b>					1500	11250	2100	2350						6600	10300	6154	1100	41354		

Sumber: PT Bina Mahawana Wisesa (data telah dilatih)

**PT BINA MAHAWANA WISESA**  
**TABEL BIAYA PENANAMAN KIRI KANAN JALAN**  
**TAHUN 1999**  
**(Dalam Ribuan Rupiah)**

NO	JENIS KEGIATAN	FISIK	BULAN												Jumlah s/d Des 1999				
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec					
1	Persiapan																		
	a. Pembuatan gubuk kerja	2 bh																	500
	b. Pembuatan papan lokasi	4 bh																	750
	c. Pembersihan jalur tanaman	40 km														5000	4000		14000
	d. Pengadaan ajir	50.000 bkg														2500	3000	2500	8400
2	Penanaman																		
	a. Pembuatan ajir dan pembuatan lobang tan	50.000 bkg																500	5000
	b. Pengangkutan bibit dan penanaman	50.000 bkg																2750	6800
	<b>JUMLAH</b>									1250					5500	9150	11250	6000	33150

Sumber: PT Bina Mahawana Wisesa (data telah diolah)

TABEL 7

**PT BINA MAHAWANA WISESA**  
**BIAYA PENANAMAN HUTAN LINDUNG**  
**TAHUN 1999**  
**(Dalam Ribuan Rupiah)**

NO	JENIS KEGIATAN	FISIK	BULAN												Jumlah s/d Des 1999					
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec						
1	Persiapan																			
	a. Pembuatan gubuk kerja	2 bh																		500
	b. Pembuatan papan lokasi	3 bh																		750
	c. Pembersihan jalur tanaman	45 km																		10100
	d. Pengadaan ajir	53.800 bkg					1500													13150
2	Penanaman																			
	a. Pemasangan ajir dan pembuatan lobang tanam	53.800 bkg																		6647
	b. Pengangkutan bibit dan penanaman	53.800 bkg																		5150
	<b>JUMLAH</b>						1500	10250	2500	2750					8000	3800	6287	1100	36297	

Sumber: PT Bina Mahawana Wisesa (data telah diolah)

Komponen biaya pemeliharaan dan pembinaan hutan menurut Standar Akuntansi Kehutanan dan perusahaan sebagai berikut:

1. Penataan areal kerja
2. Inventarisasi sebelum penebangan
3. Perapihan
4. Inventarisasi tegakan tinggal
5. Pembebasan
6. Pengadaan bibit/persemaian
7. Pengayaan/rehabilitasi tanaman.

Tabel 8  
Biaya Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan  
Tahun 1999  
(Dalam Rupiah)

No	Jenis Kegiatan	Jumlah
1	Penataan areal kerja	12.750.625
2	Inventarisasi tegakan sebelum penebangan	9.679.250
3	Perapihan	11.789.670
4	Inventarisasi tegakan tinggal	13.125.675
5	Pembebasan	10.725.625
6	Pengadaan bibit / persemaian	17.989.750
7	Pengayaan / rehabilitasi tananam	12.667.875
Jumlah		88.728.480

Sumber: PT Bina Mahawana Wisesa (data telah diolah)

#### IV. Biaya Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan

Biaya pengamanan hutan menurut Standar Akuntansi Kehutanan dan perusahaan meliputi:

1. Honor tenaga pengamanan dari kepolisian
2. Tenaga sekuriti di lokasi HPH
3. Transpor ke lokasi HPH
4. Perlengkapan
5. Asuransi



Tabel 9  
Biaya Pengamanan dan pengendalian kebakaran Hutan  
Tahun 1999  
(Dalam Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Honor tenaga pengamanan dari kepolisian	9.625.450
2	Tenaga sekuriti di lokasi HPH	10.475.100
3	Transpor ke lokasi HPH	3.012.375
4	Perlengkapan pengendalian kebakaran	4.124.750
5	Asuransi kebakaran hutan	10.576.600
Jumlah		37.814.275

Sumber: PT Bina Mahawana Wisesa (data telah diolah)

#### V. Biaya Pemungutan Hasil Hutan

Biaya pemungutan hasil hutan merupakan komponen biaya terbesar yang masuk dalam proses perhitungan biaya produksi perusahaan hutan.

Komponen biaya pemungutan hasil hutan menurut perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Biaya tenaga kerja langsung
2. Biaya tenaga kerja tidak langsung
3. *Spare parts* (suku cadang)
4. Perbaikan dan pemeliharaan alat berat
5. Penyusutan

Tabel 10  
Biaya Pemungutan Hasil Hutan  
Tahun 1999  
(Dalam Rupiah)

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Biaya tenaga kerja langsung	343.316.913
2	Biaya tenaga kerja tidak langsung	260.129.275
4	Bahan bakar	735.727.685
5	Perbaikan dan pemeliharaan	53.368.443
6	Penyusutan	1.022.650.529
Jumlah		2.415.192.845

Sumber: PT Bina Mahawana Wisesa (data telah diolah)

Perusahaan mengalokasikan *spare parts* sebagai bagian dari biaya pemungutan *logs*. *Spare parts* (suku cadang) menurut Standar Akuntansi Kehutanan tidak dibebankan sebagai biaya produksi. *Spare parts* sebesar Rp1.491.932.789 merupakan bagian dari persediaan Rp 988.564.345 dan biaya pemeliharaan alat berat Rp 503.368.443.

## VI. Biaya Pemenuhan Kewajiban terhadap Negara

Pemenuhan kewajiban terhadap negara menurut Standar Akuntansi Kehutanan terdiri atas dua bagian yaitu kewajiban teknis dan kewajiban finansial.

### a. Kewajiban Teknis

- a. Biaya Analisa Dampak Lingkungan (Amdal)
- b. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
- c. Rencana Kelola Lingkungan (RPL)

### b. Kewajiban Finansial

- a. Grading fee (BPPHH)
- b. Dana reboisasi
- c. Iuran hasil hutan
- d. Pajak bumi dan bangunan

Menurut Standar Akuntansi Kehutanan biaya-biaya yang berhubungan dengan kewajiban teknis dikapitalisasi dan dicatat sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya sebagai biaya produksi. Biaya yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban finansial dibebankan sebagai biaya produksi tahun berjalan.

Perusahaan membebankan dana reboisasi, iuran hasil hutan serta pajak bumi dan bangunan sebagai beban administrasi dan umum.

Tabel II  
Biaya Pemenuhan Kewajiban terhadap Negara  
Tahun 1999  
(Dalam Rupiah)

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Amortisasi amdal	3.305.633
2	Amortisasi rencana kelola lingkungan	2.533.204
3	Amortisasi rencana pemantauan lingkungan	2.981.322
4	Grading fee (BPPHH)	24.579.524
5	Dana rebisasi	256.725.500
6	Iuran hasil hutan	75.679.675
7	Pajak bumi dan bangunan	7.567.226
Jumlah		364.551.925

Sumber: PT Bina Mahawana Wisesa (data telah diolah)

#### VII. Pemenuhan Kewajiban Lingkungan dan Sosial

Biaya pelaksanaan pemenuhan kewajiban lingkungan sosial (HPH bina desa hutan) menurut Standar Akuntansi Kehutanan meliputi:

1. Biaya amortisasi studi diaognotik bina desa hutan
2. Pelaksanaan bina desa hutan:

##### A. Pertanian menetap

- a. Bibit unggul buah-buahan
- b. Penyuluhan hortikultura
- c. Penyuluhan tanaman pangan
- d. Penyuluhan kakao
- e. Vaksinasi ternak



- B. Peningkatan ekonomi
  - a. Pemanfaatan tenaga survey
  - b. Pemanfaatan tenaga persemaian
- C. Pengembangan sarana dan prasarana
  - a. Perbaikan gedung SD
  - b. Pengadaan peralatan belajar
  - c. Pembangunan gedung madrasah
- D. Sosial budaya
  - a. Keagamaan
  - b. Pemberian beasiswa
  - c. Pengadaan tenaga medis
  - d. Bantuan obat-obatan
- E. Konservasi sumber daya alam
  - a. Penyuluhan sumber alam/konservasi

Biaya amortisasi studi diagnostik bina desa hutan sebesar Rp1.056.379, sedangkan biaya pelaksanaan bina desa hutan sebesar Rp96.881.300.

#### VIII. Biaya Pembangunan Sarana dan Prasarana

Menurut Standar Akuntansi Kehutanan pembangunan sarana dan prasarana yang dimaksudkan adalah pembangunan jalan dan jembatan. Pembangunan jalan meliputi jalan induk, jalan cabang dan jalan ranting (jalan sarad). Biaya pembangunan jalan induk dan cabang dikapitalisasi sebagai

TABEL 12

PT BINA MAHAWANA WISESA  
 REALISASI BIAYA PELAKSANAAN HPH BINA DESA HUTAN  
 TAHUN 1999  
 (Dalam Ribuan Rupiah)

NO	JENIS KEGIATAN	UNIT	BULAN												Jumlah s/d Des 1999						
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec							
1	Pertanian menetap a. Bibit buah unggul b. Penyuluhan hortikultura c. Penyuluhan tanaman pangan d. Penyuluhan coklat e. Vakalisasi tembak	1500 big 5 kalf 5 kalf 4 kalf 150 ekr	450		400.45			375 525 450	3750	630 405 435				3750 455 479 300			420.5 480.5 500				7500 2290.95 2349.5 1695 2920
2	Peningkatan ekonomi a. Pemanfaatan tenaga survey b. Pemanfaatan tenaga persemalaman	4800 HCK 4800 HCK		2250 1275		3187.5 1725	2400 1435	2625 1935	2745 1905	2540 1830			2785 1675	2875 1475	2745 1935	2625 1455					28757.5 16665
3	Pengembangan sarana dan prasarana umum a. Perbaikan gedung SD b. Pengadaan peralatan belajar c. Pemb. Gedung madrasah	1 lokal 80 bh 2 lokal							1560 1325					1025			9000				1560 2350 9000
4	Soesial budaya a. Keagamaan b. Pelatihan tenaga kerja c. Pemberian beasiswa d. Pengadaan tenaga medis e. Bantuan obat-obatan	2 unit 15 org 10 org 1 dokter 300 org			2000			1650						6000			4000				7750 0 8650 0 4475
5	Konservasi sumber daya alam a. Penyuluhan sumber alam / konservasi	6 kalf		316.35		450	5205	450	6925	452			10434	700	1275	560					2928.35
<b>JUMLAH</b>			460	3541.35	2400.5	6112.5	5205	11060	6925	12792			10434	12820	6465	18380					96881.3

Sumber: PT Bina Mahawana Wisesa (data telah dicelah)

Tabel 13  
**ALOKASI BIAYA PEMBANGUNAN JALAN**  
**TAHUN 1999**  
(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	TENAGA KERJA	BAHAN	BBM (PELUMAS)	PENYUSUTAN	JUMLAH
Jan					
Jln Induk	6718598	7057741	4511899	10287038	28576276
Jln Cabang	6515974	7528250	4814452	10972840	29831516
Jln Sarad	1443881	1668193	1066839	2057408	6236321
Feb					
Jln Induk					
Jln Cabang	4341600	19656000	10920000	21259878	56177478
Jln Sarad	2894440	1310400	728000	1417325	3745165
Mar					
Jln Induk					
Jln Cabang					
Jln Sarad	731640	3312400	1840222	3307092	9191354
Apr					
Jln Induk	1512000	6080000	3840000	9448935	20880835
Jln Cabang	1890000	7800001	4799999	11811044	26101044
Jln Sarad	630000	2533333	160000	3937015	7260348
May					
Jln Induk	4504500	21450000	15015000	21259878	62229378
Jln Cabang					
Jln Sarad	588000	2800000	1960000	2576956	7924956
Jun					
Jln Induk	4365536	14220632	9442106	14546233	42574507
Jln Cabang	2414854	6563369	4357895	6713546	20049774
Jln Sarad	1343243	4375579	2905263	4475764	13099849
Jul					
Jln Induk	648022	2230555	1381111	2362209	6621897
Jln Cabang	5184179	17844443	11048889	18897670	52975181
Jln Sarad	648022	2230555	1381111	2362209	6621897
Aug					
Jln Induk	968993	1972414	1147586	2932397	7021390
Jln Cabang	6056206	12327585	7172415	18327480	43883686
Jln Sarad	726745	1479310	860690	2199298	5266043
Sept					
Jln Induk					
Jln Cabang					
Jln Sarad	1118069	2275862	1324138	3665496	8383565
Oct					
Jln Induk	5906477	7459124	5381892	10996488	29743981
Jln Cabang	4331416	5470024	3946721	8064091	21812252
Jln Sarad	787530	994550	717586	1466198	3965884
Nov					
Jln Induk	16443035	2765852	3115156	2380704	24704747
Jln Cabang	7687498	12907307	14537394	11109953	46222152
Jln Sarad	3833749	6453654	7268697	5554977	23111077
Dec					
Jln Induk					
Jln Cabang					
Jln Sarad	1777084	2053161	1313032	2743210	7888487
Jumlah					
Jln Induk	26268162	63236308	43834751	74213781	207553002
Jln Cabang	38001737	89896986	61597766	107156802	296653091
Jln Sarad	13917402	31486998	21526579	35762946	102692925

Sumber: PT Bina Mahawana Wisesa (data telah diolah)

beban ditanggungkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya sebagai biaya produksi. Biaya pembangunan jalan sarad dibebankan sebagai biaya produksi tahun berjalan.

Biaya pembangunan sarana dan prasarana menurut Standar Akuntansi Kehutanan meliputi:

1. Biaya amortisasi jalan utama
2. Biaya amortisasi jalan cabang
3. Biaya pembangunan jalan sarad
4. Biaya amortisasi jembatan



Biaya yang dibebankan ke biaya pembangunan sarana dan prasarana menurut perusahaan adalah semua biaya pembangunan sarana dan prasarana tahun 1999.

## 5.2 Pemisahan Biaya Produksi Tahun Berjalan Dengan Biaya Dikapitalisasi Berdasarkan Standar Akuntansi Kehutanan

Komponen biaya yang langsung dibebankan sebagai biaya produksi tahun berjalan:

### I. Perencanaan

Komponen biaya perencanaan yang langsung dibebankan sebagai biaya produksi tahun berjalan:

- Biaya rencana karya tahunan

### II. Biaya Penanaman

Unsur biaya penanaman yang langsung dibebankan sebagai biaya produksi tahun berjalan:

- Biaya penanaman kembali jalur tebang yang telah diproduksi
- Biaya penanaman tanah kosong,
- Biaya penanaman kiri kanan jalan,
- Biaya *landscaping*

### III. Biaya Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan

Komponen biaya pemeliharaan dan pembinaan hutan yang langsung dibebankan sebagai biaya produksi tahun berjalan:

- Penataan areal kerja
- Inventarisasi sebelum penebangan
- Perapihan
- Inventarisasi tegakan tinggal
- Pembebasan
- Pengadaan bibit/persemaian
- Pengayaan/rehabilitasi tanaman.

### IV. Biaya Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan

Unsur biaya pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan yang langsung dibebankan sebagai biaya produksi tahun berjalan:

- Honor tenaga pengamanan dari kepolisian
- Tenaga sekuriti di lokasi HPH
- Transpor ke lokasi HPH

- Perlengkapan
- Asuransi

#### V. Biaya Pemungutan Hasil Hutan

Biaya pemungutan hasil hutan yang langsung dibebankan sebagai biaya produksi tahun berjalan:

- Biaya tenaga kerja langsung
- Biaya tenaga kerja tidak langsung
- Perbaikan dan pemeliharaan alat berat
- Penyusutan
- Bahan bakar

#### VI. Biaya Pemenuhan Kewajiban terhadap Negara

Unsur biaya pemenuhan kewajiban terhadap negara yang langsung dibebankan sebagai biaya produksi tahun berjalan:

- *Grading fee* (BPPHH)
- Dana rebaisasi
- Iuran hasil hutan
- Pajak bumi dan bangunan

#### VII. Pemenuhan Kewajiban Lingkungan dan Sosial

Biaya pelaksanaan bina desa hutan langsung dibebankan sebagai biaya produksi tahun berjalan

#### VIII. Biaya Pembangunan Sarana dan Prasarana

Biaya pembangunan jalan sarad dibebankan sebagai biaya produksi tahun berjalan.

Komponen biaya yang dikapitalisasi sebagai beban ditangguhkan meliputi:

#### I. Biaya Perencanaan

Unsur biaya perencanaan yang dikapitalisasi sebagai beban ditangguhkan:

- Perolehan HPH dan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)
- Penyusunan Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
- Penyusunan Rencana Karya Lima Tahunan (RKL).

#### II. Biaya Pemenuhan Kewajiban Terhadap Negara

Unsur biaya pemenuhan kewajiban terhadap negara yang dikapitalisasi sebagai beban ditangguhkan:

- Biaya Analisa Dampak Lingkungan (Amdal)
- Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
- Rencana Kelola Lingkungan (RPL).

#### III. Biaya Pemenuhan Kewajiban Lingkungan dan Sosial

Unsur biaya pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial adalah biaya studi diagnostik bina desa hutan.

#### IV. Biaya Pembangunan Sarana dan Prasarana

Unsur biaya pembangunan sarana dan prasarana yang dikapitalisasi sebagai beban ditangguhkan:

- Biaya pembangunan jalan utama
- Biaya pembangunan jalan cabang
- Biaya pembangunan jembatan.

### **5.3 Perhitungan Amortisasi Beban Ditangguhkan**

Amortisasi beban ditangguhkan tahun 1999 sebesar Rp 486.349.616. Beban ditangguhkan dari masing-masing komponen dikumpulkan untuk mempermudah perhitungannya. Metode garis lurus yang digunakan untuk menghitung amortisasi beban ditangguhkan sesuai dengan metode yang dianut perusahaan.



Tabel 14  
Perhitungan Amortisasi Beban Ditangguhkan  
Tahun 1999  
(Dalam Rupiah)

No	Keterangan	Masa Manfaat	Perolehan	Amortisasi
1	Perolehan dan luran HPH	35	10.468.988.535	299.113.958
2	Rencana karya pengusahaan	35	56.670.150	1.619.147
3	Rencana karya lima tahunan	5	22.347.625	4.469.525
4	Studi diagnostik PMDH	35	31.691.395	1.056.379
5	Amdal	35	115.697.175	3.305.633
6	Rencana kelola lingkungan	30	75.996.125	2.533.204
7	Rencana pemantauan lingkungan	30	89.439.665	2.981.322
8	Jembatan	20	420.126.760	21.006.338
9	Jalan induk	35	1.869.417.115	53.411.917
10	Jalan cabang	20	1.937.043.873	96.852.193
Jumlah			15.087.418.420	486.349.616

Sumber: PT Bina Mahawana Wisesa (data telah diolah)

#### 5.4 Perbandingan Harga Pokok Produksi Menurut Perusahaan dan Standar Akuntansi Kehutanan

Untuk mengetahui selisih harga pokok produksi logs menurut perusahaan dan Standar Akuntansi Kehutanan, berikut ini disajikan perhitungannya.

## SKEMA 4

PT. Bina Mahawana Wisesa  
Perbandingan Laporan Harga Pokok Produksi  
Per 31 Desember 1999  
(Dalam Rupiah)

	Perusahaan	PSAK NO. 32	Selisih
<b>Biaya langsung:</b>			
Biaya tenaga kerja langsung	343,316,913	343,316,913	0
Grading fee (BPPHH)	24,579,524	24,579,524	0
Suku cadang ( <i>spare parts</i> )	1,491,932,788	-	(1,491,932,788)
Bahan bakar	735,727,685	735,727,685	0
<b>Jumlah biaya langsung</b>	<b>2,595,556,910</b>	<b>1,103,624,122</b>	<b>(1,491,932,788)</b>
<b>Biaya tidak langsung:</b>			
Biaya perencanaan tahunan	5,725,600	5,725,600	0
Biaya penanaman hutan	183,376,300	147,079,300	(36,297,000)
By. pemeliharaan & pembinaan hutan	88,728,480	88,728,480	0
Biaya <i>loading</i>	10,324,750	-	(10,324,750)
Sewa pangkalan	12,560,000	-	(12,560,000)
Biaya tenaga kerja tidak langsung	260,129,275	260,129,275	0
Biaya pelaksanaan bina desa hutan	96,881,300	96,881,300	0
By. Peng. & pengend. Kebakaran hutan	37,814,275	37,814,275	0
By. Perb. & pemeliharaan alat berat	-	503,368,443	503,368,443
Biaya penyusutan	1,022,650,529	1,022,650,529	0
Biaya amortisasi	315,079,168	486,349,616	171,270,448
Biaya pembuatan jalan & jembatan	606,899,028	102,692,925	(504,206,103)
<b>Jumlah biaya tidak langsung</b>	<b>2,640,168,705</b>	<b>2,751,419,743</b>	<b>(111,251,038)</b>
<b>Harga pokok produksi logs</b>	<b>5,235,725,615</b>	<b>3,855,043,865</b>	<b>(1,380,681,750)</b>

Perbandingan harga pokok produksi di atas menimbulkan selisih pada beberapa komponen biaya. Biaya-biaya yang memiliki selisih antara lain:

1. Suku cadang (*spare parts*)

Suku cadang Rp 1.491.932.788 menurut perusahaan diperlakukan sebagai biaya produksi sedangkan menurut Standar Akuntansi Kehutanan suku cadang yang sudah digunakan Rp 503.368.443 diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan alat berat, suku cadang yang belum terpakai Rp988.564.345 diperlakukan sebagai persediaan.

2. Biaya penanaman hutan

Perusahaan memasukkan semua biaya penanaman hutan Rp183.376.300 sebagai biaya produksi; Standar Akuntansi Kehutanan memisahkan antara biaya penanaman hutan alam dan hutan lindung. Biaya penanaman hutan alam Rp147.079.230 diperlakukan sebagai biaya produksi sedangkan biaya penanaman hutan lindung Rp 36.297.000 diperlakukan beban lain-lain.

3. Biaya *loading*

Biaya *loading* Rp 10.324.750 menurut perusahaan diperlakukan sebagai biaya produksi sedangkan menurut Standar Akuntansi Kehutanan diperlakukan sebagai biaya pemasaran.

#### 4. Sewa pangkalan

Sewa pangkalan Rp 12.560.000 menurut perusahaan diperlakukan sebagai biaya produksi sedangkan menurut Standar Akuntansi Kehutanan diperlakukan sebagai biaya pemasaran.

#### 5. Biaya amortisasi

Biaya amortisasi menurut perusahaan Rp 315.079.168 sedangkan menurut Standar Akuntansi Kehutanan Rp486.349.616. Selisih biaya amortisasi terjadi karena perusahaan tidak memasukkan amortisasi pembuatan jalan utama, jalan cabang dan jembatan.

#### 6. Biaya pembangunan jalan dan jembatan

Biaya pembangunan jalan utama, jalan cabang, jalan sarad dan jembatan Rp 606.899.028 menurut perusahaan dialokasikan semua sebagai biaya produksi tahun berjalan sedangkan menurut Standar Akuntansi Kehutanan hanya biaya pembangunan jalan sarad Rp 102.692.925 yang dialokasikan sebagai biaya produksi tahun berjalan.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan analisa terhadap penyajian perhitungan harga pokok produksi kayu tebangan (*log*) PT Bina Mahawana Wisesa tahun 1999, maka dapat disimpulkan bahwa biaya produksi dilaporkan lebih besar karena:

##### 1. Suku cadang (*spare parts*)

Suku cadang Rp 1.491.932.788 menurut perusahaan diperlakukan sebagai biaya produksi sedangkan menurut Standar Akuntansi Kehutanan suku cadang yang sudah digunakan Rp 503.368.443 diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan alat berat, suku cadang yang belum terpakai Rp988.564.345 diperlakukan sebagai persediaan.

##### 2. Biaya penanaman hutan

Perusahaan memasukkan semua biaya penanaman hutan Rp183.376.300 sebagai biaya produksi; Standar Akuntansi Kehutanan memisahkan antara biaya penanaman hutan alam dan hutan lindung. Biaya penanaman hutan alam Rp147.079.230 diperlakukan sebagai biaya produksi sedangkan biaya penanaman hutan lindung Rp 36.297.000 diperlakukan beban lain-lain.

### 3. Biaya loading

Biaya loading Rp 10.324.750 menurut perusahaan diperlakukan sebagai biaya produksi sedangkan menurut Standar Akuntansi Kehutanan diperlakukan sebagai biaya pemasaran.

### 4. Sewa pangkalan

Sewa pangkalan Rp 12.560.000 menurut perusahaan diperlakukan sebagai biaya produksi sedangkan menurut Standar Akuntansi Kehutanan diperlakukan sebagai biaya pemasaran.

### 5. Biaya amortisasi

Biaya amortisasi menurut perusahaan Rp 315.079.168 sedangkan menurut Standar Akuntansi Kehutanan Rp486.349.616. Selisih biaya amortisasi terjadi karena perusahaan tidak memasukkan amortisasi pembuatan jalan utama, jalan cabang dan jembatan.

### 6. Biaya pembangunan jalan dan jembatan

Biaya pembangunan jalan utama, jalan cabang, jalan sarad dan jembatan Rp 606.899.028 menurut perusahaan dialokasikan semua sebagai biaya produksi tahun berjalan sedangkan menurut Standar Akuntansi Kehutanan hanya biaya pembangunan jalan sarad Rp 102.692.925 yang dialokasikan sebagai biaya produksi tahun berjalan.

## 6.2 Saran

Sebagai bahan masukan kepada PT Bina Mahawana Wisesa penulis menyarankan untuk menerapkan Standar Akuntansi Keuangan No. 32:

1. Suku cadang sebaiknya dimasukkan sebagai biaya pemeliharaan yang sudah terpakai dan persediaan yang belum terpakai.
2. Biaya *loading*, yang merupakan biaya angkutan kayu tebangan dari *log pond* ke atas kapal, hendaknya masuk dalam komponen biaya pemasaran.
3. Sewa pangkalan bukan merupakan biaya produksi sehingga perusahaan seharusnya mengeluarkan biaya tersebut dari unsur harga pokok produksi. Hal ini disebabkan biaya tersebut merupakan unsur biaya pemasaran.
4. Biaya penanaman hutan lindung hendaknya tidak masuk dalam perhitungan biaya produksi melainkan diakumulasi dalam akun beban lain-lain.
5. Biaya pembangunan jalan utama, jalan cabang dan jembatan hendaknya tidak dimasukkan sebagai biaya produksi, tetapi dikapitalisasi sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya sebagai biaya produksi. Biaya pembangunan jalan sarad langsung dibebankan sebagai biaya produksi tahun berjalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. **Peningkatan HTI Dalam Pelita V**, Jakarta: Dirjen Reboisasi Hutan, 1989.
- Departemen Kehutanan. **Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Industri**. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan: Jakarta. 1998.
- Harnanto. **Akuntansi Biaya: Perhitungan dan Penetapan Harga Pokok**, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE UGM, 1992.
- Harnanto, D. **Akuntansi Untuk Usahawan**, Edisi Kelima, Cetakan Pertama, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1981.
- Hornigren, Charles T. **Cost Accounting: A Managerial Emphasis**, Seventh Edition, New Jersey: Prentice Hall Inc., 1991.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, **Standar Akuntansi Keuangan**, Buku Dua, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 1999.
- Junus, Mas'ud, Ir, Dr. Dkk. **Dasar Umum Ilmu Kehutanan: Kegiatan Dalam Bidang Kehutanan**. Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Timur, 1985.
- Kam, Vernon, **Accounting Theory**, California: John Willey and Sons Inc., 1990.
- Kartadinata, Abbas. **Akuntansi dan Analisis Biaya: Suatu Pendekatan Terhadap Tingkah Laku Biaya**, Edisi Revisi, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Khaeruddin. **Butir-Butir Tata Lingkungan**, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Manan, Syafii, Ir.,M.Sc. **Silvikultur**, Lembaga Kerja Sama Fakultas Kehutanan IPB: Bogor, 1976.
- Mardiasmo. **Akuntansi Biaya: Penentuan Harga Pokok Produksi**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- Mulyadi. **Akuntansi Biaya**, Edisi Kelima, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 1993.



Mulyadi. *Akuntansi Biaya: Penentuan Harga Pokok dan Pengendalian Biaya*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE UGM, 1986.

Polimeni, Ralph S., Frank J. Fabozzi dan Arthur H. Adelberg. *Cost Accounting: Concept and Application for Managerial Decision Making*, Third Edition, New York: Mc. Graw-Hill Inc., 1991.

